

# PERKEMBANGAN SOSIO-EKONOMI DAN PERKEBUNAN MASYARAKAT KUNINGAN, 1830-1870

Tendi

MP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

tendy.chaskey@yahoo.co.uk

## **Abstrak**

*Masyarakat Kuningan adalah masyarakat yang telah akrab dengan dunia pertanian sejak berabad-abad yang lalu, dari zaman kerajaan tradisional hingga sekarang. Namun, tidak banyak literatur yang membahas mengenai sejarah ekonomi masyarakat pedesaan ini. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan dalam kurun pemberlakuan Sistem Tanam Paksa, sejak tahun 1830 hingga tahun 1870. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan lima tahapannya, yaitu: pemilihan topik; pengumpulan sumber; verifikasi (kritik sejarah); interpretasi; dan penulisan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pada umumnya kegiatan perkebunan di Kuningan berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang cukup menggembirakan bagi pihak kolonial. Meski demikian, pihak yang diuntungkan ternyata bukanlah para buruh kebun yang menggarap lahan-lahan kopi untuk mewujudkan panen yang melimpah tersebut, melainkan pihak pemerintah Hindia Belanda beserta kaki tangannya yang duduk di pelbagai kursi struktur pemerintahan yang ada.*

**Kata kunci: sosio-ekonomi, perkebunan, penjajahan, kolonial**

## **Abstract**

*Brass society is a society that has been familiar with the world of agriculture centuries ago, from the days of the traditional kingdoms until now. However, not a lot of literature that discusses the economic history of this rural community. This paper has the aim to identify the socio-economic condition of Kuningan Regency society within the implementation of the Cultivation System, from 1830 to 1870. The method used in this research is the historical method with five stages, namely: choice of topics; collection of resources; verification (historical criticism); interpretation; and writing. Based on this research note that in general the plantation activity in Kuningan running well and making a profit is quite encouraging for the Colonial. However, the beneficiary was not the workers who worked on the farm lands of coffee to realize the abundant harvest, but the Dutch government and its henchmen are sitting in different seats of existing governance structur.*

**Keywords: socio-economic, plantation, imperialism, colonialism**

## A. PENDAHULUAN

Masyarakat pedesaan di tanah Pasundan biasanya digambarkan sebagai sosok-sosok yang harmonis dengan kehidupan alam. Mereka memiliki sifat yang sangat sopan, lembut, dan giat saling tolong menolong sesama anggota masyarakatnya. Pembawaan itu dapat terjadi karena pelbagai macam hal, yang salah satunya adalah faktor geografis atau lingkungan alam. Dari kondisi alam yang dekat dan dipahaminya itu, masyarakat Sunda membangun peradabannya. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat, umumnya didasari oleh pengetahuan yang dimilikinya di dalam kehidupan.

Kultur budaya penduduk Sunda amat dekat dengan kultur masyarakat agraris. Budaya masyarakat Sunda merupakan budaya yang identik dengan kelompok masyarakat petani, yang perkembangannya disesuaikan dengan pengetahuan budaya yang mereka miliki (Melalatoa, 1995). Dalam konteks ini, Hasan Mustapa mengungkapkan bahwa masyarakat Sunda merupakan salah satu kelompok masyarakat yang pertama kali dekat dengan kehidupan bercocok tanam (Mustapa, 1985). Di daerah Jawa Barat, pertanian menjadi mata pencaharian yang paling penting dan utama bagi penduduknya. Sistem dalam bidang ini telah berkembang dengan sangat pesat, mulai dari sistem berladang, ngahuma, dan tani sawah atau juga dikenal sebagai tumpang sari.

Bertani juga menjadi pilihan masyarakat Kuningan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Kuningan memiliki potensi yang amat besar dalam sektor pertanian karena didukung dengan faktor demografis masyarakat, tingkat kesuburan tanah yang baik, ketersediaan sumber air, dan kondisi iklim. Dengan semua faktor yang juga disokong ilmu tani yang telah diturunkan secara turun temurun dari leluhurnya, penduduk lembah Ciremai ini bisa mendapatkan hasil bumi yang maksimal dari waktu ke waktu. Semua hal yang memengaruhi aspek pertanian tersebut dapat mengarahkan masyarakat Kuningan untuk menjadi “*wewengkon benteng pertahanan pertanian*”.

Berdasarkan catatan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Diperta) Kabupaten Kuningan, pada tahun 2014 luas lahan sawah di daerah ini telah mencapai 28.644 Ha, di mana 20.570 Ha di antaranya berupa sawah irigasi dan 8.346 Ha dalam bentuk sawah tadah hujan (BPS Kabupaten Kuningan, 2015). Areal persawahan yang

sangat luas ini sangat mensejahterakan penduduknya, apalagi jika ditambah dengan hasil kebun yang juga tidak kalah melimpahnya.

Jika melihat uraian tersebut, kita dapat ketahui bahwa masyarakat Kuningan merupakan salah satu masyarakat yang akrab dengan dunia pertanian. Proses tersebut tentunya telah berjalan dengan sangat lama, dari pertanian yang menggunakan tenaga manusia dan hewan pada zaman kerajaan tradisional hingga era modern yang memanfaatkan mesin dan alat otomatis sebagai tenaga produksinya. Meski sejarah pertanian ini telah berjalan dalam waktu yang tidak sebentar, anehnya tidak ada akademisi yang tertarik membahas kajian agraris masyarakat Kuningan. Padahal, daerah ini merupakan salah satu bahan bakar penting bagi bergeraknya roda perdagangan kota pelabuhan Cirebon.

Terkait pembahasan ini, ada beberapa literatur yang sebenarnya mengkaji aspek agraris Cirebon yang juga menyinggung kegiatan pertanian di wilayah Kuningan. Literatur pertama, sebuah penelitian karya Jan Breman yang berjudul, "*Control of Land and Labour in Colonial Java: A Case Study of Agrarian Crisis and Reform in the Region of Cirebon during the First Decades of the 20th Century*". Penelitian sosiologi pedesaan dengan pendekatan sejarah tersebut membahas politik perkebunan pemerintah kolonial Belanda dengan fokus terpenting pada kerugian masyarakat petani yang diakibatkan oleh perombakan kepemilikan tanah di Cirebon pada awal abad ke-20. Dalam buku itu, Breman juga mengungkapkan wilayah Kuningan bagian timur sebagai salah satu areal perkebunan tebu yang turut menyokong industri gula di Cirebon. Literatur yang kedua adalah disertasi M. R. Fernando yang berjudul, "*Peasants and plantation economy; The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the First Decade of the Twentieth Century*". Penelitian akademis yang dipersembahkan untuk penyelesaian studinya di Monash University itu mengungkapkan peran aktif pihak kolonial Belanda di dunia pertanian Cirebon dalam kurun waktu 1830 hingga 1910-an. Selain itu, ia juga menuliskan aktivitas-aktivitas para perantau asal Jawa Tengah yang turut membantu kegiatan pertanian masyarakat Karesidenan Cirebon, termasuk di antaranya di Kuningan.

Meski demikian, kajian historis yang membahas pertanian Kuningan secara khusus ternyata belum juga dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini hendak

mengungkapkan pertanian masyarakat Kuningan secara historis, dengan titik fokus pada tahun 1830-1870, di mana Tanam Paksa diberlakukan secara nasional oleh pemerintahan kolonial. Tujuan penting tulisan ini adalah mengidentifikasi kondisi sosio-ekonomi masyarakat di Kabupaten Kuningan sejak diberlakukannya *Cultuurstelsel* oleh pihak Belanda pada 1830 hingga kemudian dihentikan secara resmi pada tahun 1870 untuk melaksanakan politik pintu terbuka pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap arus modal dan investasi pihak-pihak swasta.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang merupakan suatu proses pengujian dan analisis yang dilakukan secara kritis terhadap pelbagai rekaman dan peninggalan yang berasal dari masa lampau (Gottschalk, 2008). Penanganan dan upaya sinkronisasi bukti-bukti sejarah secara tepat menjadi landasan penting dalam metode penelitian semacam ini. Secara umum, metode sejarah terdiri dari lima tahap yang berkaitan satu sama lain. Kelima tahapan itu adalah: (1) pemilihan topik; (2) pengumpulan sumber; (3) verifikasi yang berupa kritik sejarah atau menguji keabsahan sumber; (4) interpretasi: analisis dan sintesis; dan (5) penulisan atau historiografi sejarah (Kuntowijoyo, 1995).

Topik yang hendak diangkat dalam tulisan ini adalah sejarah sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan bidang pertanian sebagai salah satu mata pencaharian paling penting bagi masyarakat. Untuk mempermudah kajian, pembahasan akan difokuskan hanya dalam jangka waktu 40 tahun saja, yaitu sejak tahun 1830 sampai tahun 1870. Langkah kedua adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah terkait yang berasal dari kurun waktu yang hendak dikaji, dengan mayoritas sumber yang wujudnya adalah dokumen tertulis. Sumber primer dari dokumen tertulis ini adalah arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sedangkan sumber sekundernya adalah data-data yang tidak berasal dari masa seputar kajian historis yang diangkat, seperti tulisan-tulisan Jan Breman dan M. Radin Fernando. Sumber-sumber yang kedua ini sangat membantu penulis dalam merekonstruksi sejarah yang dibahas dalam penelitian ini.

Setelah sumber-sumber sejarah tersebut telah terkumpul, penulis melakukan pengujian keaslian dan kesahihannya dengan melakukan kritik internal dan eksternal pada data-data tadi. Kritik internal memiliki tujuan yang sangat penting dalam metode sejarah, yaitu agar penulis mendapatkan data historis faktual melalui dokumen dan dokumen kesejarahan (Usman, 1986). Dengan proses verifikasi ini, data-data tersebut akan menjadi fakta sejarah yang sangat berarti (Frederick dan Soeroto, 2005). Fakta-fakta sejarah ini merupakan bahan yang penting untuk mengungkapkan kebenaran sejarah.

Setelah melalui proses ini, fakta yang ada dianalisa dan disintesa oleh penulis agar dapat memperoleh interpretasi yang integratif terkait permasalahan yang tengah dibahas. Interpretasi ini dapat dikatakan pula sebagai eksplanasi sejarah karena data yang diperoleh telah disimpulkan dengan keterangan dan penjelasan yang mumpuni agar dapat dipahami secara luas. Seringkali, proses interpretasi atau penafsiran dianggap sebagai biang subyektivitas. Namun walau demikian, proses tersebut akan tetap ada dan tidak mungkin dapat dihilangkan mengingat data pun tidak akan berbicara tanpa adanya peran sejarawan dalam proses penafsiran ini (Kuntowijoyo, 1995).

Selanjutnya, proses yang terakhir adalah penulisan sejarah atau yang biasa disebut sebagai historiografi. Penulisan sejarah baru dapat dilakukan jika proses penelitian telah dilaksanakan karena memang penelitian tersebut merupakan dasar bukti dan kebenarannya (Yatim, 1997). Langkah final ini selalu diupayakan dengan senantiasa mengedepankan aspek kronologis dan penekanan pada kasus-kasus penting dari bidang yang dikaji pada setiap perkembangan waktu yang ada (Abdurrahman, 1999).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Struktur Sosial Masyarakat Kuningan**

Secara kultural, Kuningan merupakan salah satu wilayah yang menjadi tempat bersemayamnya budaya Sunda. Adat, kebiasaan, dan bahasa khas orang Priangan yang digunakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat Kuningan, dengan jelas menunjukkan identitas mereka tersebut. Sedangkan secara politis, Kuningan selalu memiliki kedekatan dengan kekuatan-kekuatan besar yang ada di sekitarnya. Ekadjati menguraikan bahwa dengan Galuh yang pernah berjaya sebagai sebuah kerajaan besar, Kuningan memiliki hubungan kekerabatan karena salah satu cucu dari pendiri Galuh,

Wretikandayun, yang bernama Demunawan menikah dengan puteri dari Kuningan. Begitu pun dengan Cirebon, Kuningan terikat tali persaudaraan karena pemimpin Cirebon, Syarif Hidayatullah, memiliki anak angkat bernama Suranggajaya (yang kelak menjadi Adipati Kuningan) yang dititipkan oleh Sang Sunan disana (Edi S. Ekadjati, 2003). Kedekatan Kuningan dengan Cirebon terus berjalan, hingga kemudian Herman Willem Daendels memutuskannya pada saat ia menjabat sebagai pimpinan tertinggi pemerintah kolonial Belanda dengan cara melakukan reorganisasi struktur pemerintahan dan daerah di awal abad ke-19 (De Haan, 1912).

Menurut M.R. Fernando, Cirebon memiliki kesamaan dengan dua kerajaan pecahan Mataram, dalam hal pengaturan aset dan kekayaannya. Cara keduanya dalam mengatur tanah dan masyarakat menunjukkan kemiripan dan benar-benar tidak jauh berbeda (Fernando, 1982). Begitu pun dengan pengaturan Cirebon atas wilayah Kuningan, tentunya hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh Yogyakarta dan Surakarta terhadap wilayah-wilayah kekuasaannya. Saat untuk pertama kalinya perusahaan dagang asal Belanda, VOC, datang dan melakukan hubungan perdagangan dan diplomatis dengan Cirebon, mereka melihat bahwa anggota-anggota kerajaan menjadi pengelola wilayahnya yang dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang lebih kecil. Para penguasa yang menjadi orang kepercayaan kerajaan tersebut, mengelola warga masyarakat yang tinggal di daerah itu dan mengelompokkannya ke dalam keluarga-keluarga (Padmo, 1998).

Kuningan sendiri termasuk ke dalam daerah yang dikelola oleh bangsawan yang sangat dekat dengan Cirebon. Pertama-tama oleh Adipati Kuningan, yang merupakan anak angkat Sunan Gunung Djati. Kemudian, sepeninggalnya dilanjutkan oleh sosok bernama Geusan Ulun beserta keturunannya yang tersebar di sejumlah tempat di Kuningan dengan julukan Dalem. Jika di Priangan dipakai untuk julukan mantan bupati, maka kata Dalem di Kuningan ini adalah julukan bagi seseorang yang pernah menjadi kepala pemerintahan di sebuah daerah tertentu. Beberapa dalem yang ada di antaranya adalah Dalem Citangtu, Dalem Pasawahan, Dalem Kasturi, Dalem Dagojawa, Dalem Winduherang, Dalem Salahonje, dan lain-lain (Ekadjati, 2003). Jika dilihat dari nama-namanya, para pemimpin daerah ini seakan-akan mengasosiasikan dirinya dengan tempat mereka bermukim atau bahkan mungkin tempat tinggal mereka itu lah yang diambil dari

nama-nama penguasanya di masa lampau. Para Dalem ini termasuk kalangan bangsawan karena buyut Sang Adipati Kuningan sendiri adalah raja Sunda, yaitu Prabu Niskala Wastu Kencana.

Sistem manajemen dan kontrol yang dilakukan oleh para bangsawan terhadap penduduk dan tanah yang dipercayakan kepadanya, merupakan sumber yang utama bagi kekayaan dan kekuasaan mereka. Dalam konteks pengelolaan ini, para penguasa menjadi pelindung dan penjamin kelangsungan hidup masyarakat yang ada di tanahnya. Sementara itu, untuk imbalannya, penduduk mengabdikan diri dan menyeter sejumlah upeti kepada para pemimpin daerah. Hubungan simbiois mutualisme di antara penguasa dan masyarakat ini dikenal sebagai hubungan *patron-client*. Istilah tersebut merujuk pada sebuah bentuk organisasi sosial yang dicirikan oleh hubungan patron-klien, dimana patron yang berkuasa dan kaya memberikan pekerjaan, perlindungan, infrastruktur, dan berbagai manfaat lainnya kepada klien yang tidak berdaya atau miskin. Imbalannya, klien memberikan berbagai bentuk kesetiaan, pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada patron (Hefni, 2009).

Saat Daendels melakukan pembagian ulang wilayah di Jawa Barat, maka disadari ataupun tidak ia telah memangkas wewenang Cirebon atas tanah yang selama ini dimilikinya. Hal itu menurunkan status dan derajat keluarga bangsawan Cirebon serta memotong akses mereka terhadap upeti daerah-daerah sekitar yang selama ini diterimanya (Breman, 2014). Meski demikian, praktik-praktik feodal ternyata tidak sepenuhnya dihentikan. Pemerintah Hindia Belanda justru memosisikan diri mereka sebagai tuan yang baru dengan menjadikan penguasa-penguasa berdarah biru daerah yang memiliki pengaruh sebagai kaki-tangannya. Pasal 67 dari *Regerings Reglement* / RR (Peraturan Pemerintah) memutuskan bahwa penduduk pribumi, selama situasinya memungkinkan, sebisa mungkin harus dibiarkan di bawah wewenang kepala daerah mereka sendiri. Para kepala itu harus diangkat atau diakui oleh gubernur-jenderal. Dengan cara demikian, di daerah pemerintahan-langsung Jawa dan Madura para bupati diangkat, dan dengan cara yang sama para kepala *Vorstenlanden* di Jawa dan para kepala wilayah otonom (kebanyakan di *Buitengewesten* 'Wilayah Luar Jawa dan Madura') diakui (Van Anrooij, 2014).

Ketika *Cultuurstelsel* mulai diberlakukan pada tahun 1830, Kuningan telah menjadi sebuah daerah administratif yang berada langsung di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda dan disebut sebagai kabupaten. Namun tatanan masyarakat yang ada ternyata tidak banyak berubah, karena posisi bangsawan lokal tetap terjaga. Secara garis besar, struktur sosial masyarakat Kuningan pada abad ke-19 dibagi menjadi dua macam, yaitu *menak* atau kelompok penguasa yang berasal dari golongan ningrat dan *cacah* atau kelompok yang merupakan rakyat biasa.

*Menak* adalah golongan bangsawan yang ada di tanah Sunda. Dalam perkembangannya, kelompok *menak* dibagi menjadi dua, yaitu yang didasarkan pada garis darah atau keturunan dan yang mendapatkan status sosial tinggi karena kedudukannya sebagai pegawai yang diangkat oleh pemerintah kolonial. Sedangkan, kelompok *cacah* adalah kelompok masyarakat yang berada dalam lapisan yang rendah. Hal itu dapat terjadi karena kelompok yang juga dikenal sebagai somah tersebut hanya terdiri dari kaum yang dipandang rendah, seperti pedagang kecil, buruh, kaum petani, dan rakyat jelata lainnya (Muanas, 1998). Pelapisan sosial masyarakat ini tidak banyak berubah sepanjang masa kolonialisme Indonesia, hingga kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada 1945 melunturkan struktur sosial vertikal masyarakat tersebut secara permanen.

### **Perkembangan Sosio-Ekonomi Masyarakat Kuningan, 1830-1870**

Sebelum Johannes van den Bosch datang ke Batavia dan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kegiatan ekonomi sebagian masyarakat Kuningan yang termasuk wilayah Gebang tetap berjalan sebagaimana berlakunya Sistem Priangan (*Preangerstelsel*). Terobosan Daendels dan Raffles dalam sistem pengelolaan tanah, ternyata tidak benar-benar terasa di daerah ini. Hal itu terlihat dari kondisi ekonomi dan masyarakat pribumi di Cirebon pada pergantian abad 18 ke 19 yang secara umum tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti karena sistemnya masih dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan komersial yang ada pada masa VOC atau lengkapnya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (Bastin, 1957). Kegiatan ekonomi yang utama masih bertumpu pada komoditas kopi, melalui praktik pengawasan tidak langsung dengan menggandeng para pembesar pribumi. Usaha penanaman kopi dalam sistem perkebunan ini sangat

menguntungkan karena lebih mudah dikelola ketimbang penanaman kopi pagar dan kopi hutan yang *space* kontrolnya terlalu luas.

Sistem perkebunan yang dijalankan dengan perantara kelompok aristokrat lokal itu terlihat memberi sejumlah perubahan mendasar dalam kehidupan penduduk. Mata pencaharian masyarakat yang awalnya merupakan para pengembara pertanian, ternyata sedikit demi sedikit mulai bergeser menjadi lebih menetap ketika sistem perkebunan ini diberlakukan. Saat wilayah dataran tinggi daerah selatan Cirebon, yang termasuk di dalamnya Kuningan, dibuka untuk perkebunan kopi, instruksi dari Batavia mengharuskan para pemimpin lokal untuk memobilisasi tenaga kerja yang sangat banyak jumlahnya. Seluruh tenaga kerja yang didapat melalui sarana *cacah* ini dipaksa tinggal dekat perkebunan kopi. Disana, mereka harus belajar menanam tanaman pangan pada sawah-sawah yang bertingkat dan bukan mempertahankan pola lama pertanian *swidden* di tempat-tempat yang selalu berbeda satu sama lain (De Haan, 1910). Para petani membuat sawah bertingkat (*terrasering*) atau menanam padi pada sawah-sawah tegal yang kering. Karena penanaman sawah meningkat di Cirebon, pertanian *swidden* menurun secara substansial (Padmo, 1998). Sejak abad ke-19, masyarakat Kuningan pun berangsur-angsur mulai meninggalkan sistem pertanian *huma* atau berpindah ladang. Mereka mulai menetap di tempat-tempat tertentu dan membangun pemukiman-pemukiman penduduk, yang kemudian berkembang menjadi desa-desa di seantero Kuningan. Bukti bahwa abad ke-19 menjadi tolak penting pendirian dan pembangunan desa-desa itu, bisa dilihat dari paparan sejarah masing-masing desa yang rata-rata banyak dimulai dari angka tahun 1800-an.

Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch resmi menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan ia mengeluarkan kebijakan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) di seluruh wilayah kolonial. Sejak saat itu, ekonomi barat dengan sistem uangnya mulai menyebar dari perkotaan dan merasuk ke wilayah pedesaan, bahkan hingga satuan wilayah yang terkecil. Sistem Tanam Paksa sendiri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial agar mewajibkan setiap desa yang ada untuk menyisihkan 20% tanahnya guna ditanami oleh komoditi ekspor, seperti kopi, tebu, dan nila. Selanjutnya, hasil bumi yang ada di desa tersebut akan dibeli kembali oleh pemerintah namun dengan harga yang sudah ditentukan secara sepihak. Untuk meraup

keuntungan yang lebih besar, pemerintah kolonial terkadang menggusur lahan pertanian masyarakat agar mereka dapat mempergunakannya (Furnivall, 1944). Secara resmi, tanah yang harus disediakan hanya seperlima dari keseluruhan luas desa. Namun praktiknya, ketentuan ini sering dilanggar sehingga melampaui ketentuan yang ada.

Pada permulaan Sistem Tanam Paksa, dataran tinggi di Jawa Barat dijadikan sebagai sebagai pusat penanaman *tarum* atau nila. Meski dibarengi dengan penanaman komoditas lain, seperti kopi, tebu, dan teh, van den Bosch tetap menganggap bahwa tanaman nila lah yang akan menjadi komoditas unggulan tanam paksa. Berdasarkan penelitian Inspektur Tanaman, G.E. Tesseire, disimpulkan bahwa Priangan dapat menghasilkan panen yang memenuhi sebagian besar jumlah penghasilan nila yang dibutuhkan. Berdasarkan laporan tersebut, Cirebon juga dianggap sebagai tempat yang cocok oleh pemerintah kolonial untuk perkebunan nila dan produksinya dapat dilipatgandakan meski dalam waktu yang sangat singkat (Breman, 2014). Penguasa karesidenan Cirebon ingin perkebunan nila di daerah mereka berjalan dengan sukses dan lancar, oleh karenanya memilih Kuningan dan Majalengka sebagai dataran tinggi Cirebon untuk penanaman komoditas jenis ini. Daerah yang berada di bawah kaki Gunung Ciremai memang dikenal sebagai lahan yang subur. Di Kuningan, daerah-daerah yang dimaksud adalah Darma, Kadugede, Cigugur, Jalaksana, dan Mandirancan.

Harapan terhadap nila ternyata terlalu tinggi karena komoditas ini justru lebih banyak menghasilkan kerugian ketimbang keuntungan. Berdasarkan temuan L. Vitalis, Inspektur Tanaman yang menginspeksi dataran tinggi Pasundan sejak April tahun itu, diketahui bahwa penanaman *tarum* telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang sangat luar biasa. Saat berkeliling melaksanakan tugasnya itu, seringkali ia bertemu dengan penduduk yang terluka karena serangan binatang buas saat menanam nila di tempat yang jauh dari pemukiman, dan menemukan warga yang kurus tak berdaya karena kekurangan gizi dan makanan (Vitalis, 1835).

Rakyat yang melakukan penanaman benar-benar menderita karena terbebani dengan penyerahan wajib dan pajak yang sangat tinggi. Walaupun terdapat persamaan yang jelas antara sistem eksploitasi VOC dengan sistem tanam paksa kolonial, khususnya jika dilihat dari segi penyerahan wajib penduduk, dalam kenyataannya pengaruh sistem tanam yang kedua ini lebih dalam menusuk kehidupan masyarakat desa. Padahal, jika

dilihat dari hitungan waktunya, pengaruh yang ditanamkan VOC jauh lebih lama ketimbang pemerintah kolonial (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993). Lebih beratnya Sistem Tanam Paksa, setidaknya dapat disebabkan oleh dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu peningkatan efisiensi yang berakibat pada penyerahan wajib (*contingenteringen*) dan iming-iming bonus (*cultuurprocenten*) yang semakin menuntut kinerja yang maksimal dari para buruh perkebunan. Kedua hal tersebut muncul sebagai akibat dari apa yang van Niel sebut sebagai *local arrangements* (berbagai pengaturan lokal). Pengaturan ini memang dilakukan oleh para pegawai kolonial untuk mengusahakan produksi tanaman wajib pemerintahan mereka (van Niel, 1972). Ketidakpuasan dan nestapa yang ada pada masa itu, membuat rakyat semakin resah sehingga mencoba memberikan perlawanan sebagai jalan akhir dari perjuangan hidupnya.

Sebagai daerah yang telah resah sejak sepenggal akhir abad ke-18, karesidenan Cirebon memiliki potensi perlawanan yang paling tinggi ketimbang dari karesidenan-karesidenan lain. Meski para petinggi di Batavia dan Jawa Barat berusaha untuk menutupinya dan tetap bersikap tenang, namun ternyata mereka tetap memikirkan dan membicarakannya secara sembunyi-sembunyi. Sebuah nota yang ditulis oleh seorang anggota Dewan Hindia Belanda menunjukkan bahwa ia sangsi akan laporan Residen Cirebon mengenai sikap sukarela yang ditunjukkan oleh para pekerja perkebunan di sekitar daerahnya saat melaksanakan tanam paksa komoditas nila. Bahkan, jika kebijakan ini terus dilakukan, maka pemberontakan bisa saja berkobar dengan sangat hebat di seluruh wilayah karesidenan (Breman, 2014). Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kuningan yang memang menjadi tempat ditanaminya tumbuhan nila milik pemerintah. Dengan dasar kesamaan nasib dan tanggungan, para pekerja perkebunan di daerah tersebut merasa terhubung dengan para buruh yang ada di wilayah lain Cirebon. Sebenarnya, jika ada praktik semena-mena pemerintah kolonial yang memantik saja, maka gelora perlawanan para buruh perkebunan kolonial itu akan membara di Kuningan dan seluruh wilayah Cirebon.

Setelah berjalan selama kurang dari setengah dekade, pemerintah kolonial pun berangsur-angsur mulai menghentikan penanaman produk tersebut sejak tahun 1833. Selain karena adanya laporan mengenai penderitaan masyarakat Priangan yang sangat mengejutkan dari L. Vitalis dan kekhawatiran tentang potensi gerakan petani, di tahun

1834 Johannes van den Bosch juga telah selesai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia lalu kembali ke Belanda. Padahal van den Bosch adalah sosok utama dan juga terakhir yang menjadi penyokong adanya penanaman nila.

Ketika nila sudah tidak lagi memberi harapan yang tinggi, maka pemerintah kolonial Belanda segera mencari produk lain yang sekiranya dapat memberikan keuntungan maksimal untuk kas keuangan negara mereka. Si biji hitam bernama kopi yang sempat pemerintah Hindia Belanda abaikan pada saat penanaman nila tengah digaungkan pun kemudian dilirik kembali dan diusung sebagai produk dagang andalan. Menurut hemat mereka, produksi komoditas dagang yang telah diperkenalkan sejak lebih dari seabad sebelumnya itu akan jauh lebih menguntungkan ketimbang produksi tanaman nila. Hal itu terbukti karena beberapa tahun setelahnya perkebunan kopi menjadi primadona sumber finansial pemerintah Hindia Belanda. Fakta ini dibenarkan banyak kalangan pegawai kolonial, yang salah satunya dinyatakan oleh Direktur Tanaman B.J. Elias pada tahun 1836 bahwa hasil tertinggi tanam paksa didapat dari perkebunan kopi (Baardewijk, 1986). Menggelembungnya pundi-pundi keuangan yang dimiliki pemerintah tersebut didasarkan oleh adanya perintah penanaman kopi yang disertai dengan konsep pengelolaan perkebunan yang di dalamnya terdapat gaya komando tradisional yang menuntut kerja secara sukarela.

Antara tahun 1833 hingga tahun 1840 penanaman kopi diperluas lagi secara besar-besaran (Breman, 2014). Lahan-lahan di dataran subur Kuningan yang awalnya dipenuhi tanaman nila pun segera beralih fungsi menjadi perkebunan-perkebunan kopi. Selain wilayah yang berada di sekitar Ciremai, wilayah Kuningan lain yang dijadikan sebagai perkebunan kopi itu adalah daerah perbukitan sebelah selatan Kuningan yang memanjang dari daerah Darma hingga ke Subang. Bahkan, perkebunan kopi di Subang masih ada hingga saat ini, meski memang produktivitasnya tidak terlalu tinggi karena diolah sebagai kebun campuran bersama tanaman-tanaman lain, seperti pohon pisang, dan pohon durian.

Hasil dari tanam paksa ternyata benar-benar menguntungkan pemerintah kolonial dan negeri induk Belanda. Secara keseluruhan, keuntungan pemerintah kolonial baru berkisar pada angka *f.* 12,9 juta pada tahun 1830. Dan kemudian semakin meningkat menjadi *f.* 74,2 juta pada tahun 1840, dan terus meroket tinggi hingga sekitar mencapai

angka ratusan juta gulden pada tahun 1857 (Burger, 1962). Sebagiannya, disumbangkan oleh sektor pajak tanah, yang pada tahun 1835 telah menyumbang pemasukan negara sebesar *f.* 7.679.359, dan angkut tersebut terus meningkat hingga mencapai *f.* 9.364.904 pada tahun 1840 (Kartodirdjo, 1977). Dari total keuntungan yang berhasil diraih, kopi merupakan penyumbang pemasukan yang paling penting.

Besarnya keuntungan yang dapat diraup pemerintah kolonial dari komoditas kopi, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Hasil Keuangan dari Sistem Tanam Paksa, 1840-1859 ('000 gulden)**

<b>Tanaman Budidaya</b>	<b>1840-1849</b>	<b>1850-1854</b>	<b>1855-1859</b>
Kopi	+ 64,827	+ 7,540	+ 105,599
Tebu	- 4,082	+ 3,385	+ 33,705
Nila	+ 15,562	+ 6,759	+ 5,855
Cochenille	+ 499	+ 445	- 44
Kulit Manis	- 323	+ 47	- 206
Lada	+ 191	+ 205	+ 203
Teh	- 2,181	- 1,841	- 2,449
Tembakau	- 95	- 5	- 61
<b>Jumlah</b>	<b>+ 74,398</b>	<b>+ 86,534</b>	<b>+ 142,603</b>

Sumber : C. Fasseur (1975)

Keuntungan yang diperoleh dari penyerahan wajib tanam paksa kopi dari tahun ke tahun tidak pernah menyurut, bahkan terus menunjukkan grafik yang semakin naik. Bahkan, jika merujuk pada catatan Fasseur tersebut, diketahui bahwa peningkatan yang ada sangatlah mencengangkan karena jumlah pendapatan pemerintah Hindia Belanda terus naik berkali-kali lipat dari waktu ke waktu.

Pergantian pembudidayaan komoditas dari nila ke kopi, yang kemudian memberi keuntungan yang sangat fantastis kepada pemerintah, ternyata tidak terlalu memengaruhi nasib para buruh kebun yang dipaksa untuk bekerja di dalamnya. Justru, keuntungan pihak kolonial yang luar biasa itu malah dibarengi dengan semakin beratnya beban yang ditimpakan kepada masyarakat. *Cultuurprocenten* tinggi yang tetap diberlakukan pemerintah nyatanya membuat sebagian besar para kepala perkebunan, yang terdiri dari

kepala Eropa dan pribumi, tidak terlalu memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Justru mereka menjadi bertindak lebih membabi-butakan karena ingin meraih hasil yang maksimal dalam kegiatan usahanya (Croockewit, 1866). Dengan dasar demikian, tidak mengherankan apabila kemudian jajaran pimpinan kegiatan penanaman kopi di tingkat daerah mempekerjakan penduduk dengan semena-mena.

Penderitaan masyarakat ketika berlangsungnya penggalakkan penanaman kopi untuk yang kedua kalinya itu dapat terjadi karena tempat yang hendak dijadikan sebagai lahan perkebunan berada di wilayah yang jauh dari daerah asal mereka. Kebutuhan tanah dalam jumlah yang sangat luas untuk budidaya kopi hanya tersedia di tempat yang jauh dari pemukiman *cacah* masyarakat desa. Lahan yang sangat prospektif itu biasanya terdapat di dataran yang amat tinggi, sekitar lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Meski jaraknya jauh dari tempat tinggal, para petani itu tetap diharuskan membuka lahan-lahan yang perawan dan masih dipenuhi semak belukar tersebut untuk kepentingan usaha dagang pemerintah kolonial. Penduduk Karesidenan Cirebon yang sebagian besarnya terdapat di wilayah yang lebih rendah pun dipaksa bergerak ke arah Kuningan sebagai dataran yang lebih tinggi untuk membatasi hutan. Kondisi wilayah selatan Cirebon yang dipenuhi dengan perbukitan tersebut menyebabkan pembukaan rimba untuk kebun kopi tidaklah mudah, karena para pekerjanya harus menghadapi banyak tantangan yang mendebarakan. Menurut Breman, pekerjaan itu bukanlah hal yang ringan untuk dilaksanakan. Terlebih lagi iklim dan cuaca ketinggian tersebut tidak terlalu bersahabat dengan para buruh yang datang dari wilayah yang lebih panas. Ketika matahari pagi hendak beranjak meninggi, dingin dan tetesan air hujan sudah mulai turun dari langit membahasi seluruh buruh. Dukungan akomodasi dan logistik yang serba seadanya membuat kesehatan mereka terus terganggu. Tingkat kematian pekerja-pekerja ini menjadi sangat tinggi karena di samping itu terdapat pula ancaman yang datang secara tiba-tiba dari binatang buas yang hidup di tengah kerimbunan hutan (Breman, 2014).

Seiring meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja dan buruh perkebunan, meningkat pula praktek-praktek pemaksaan terhadap para petani miskin yang dilakukan oleh para kepala daerah. Karena penolakan hanya akan mengarahkan pada hukuman yang sangat berat, maka pada akhirnya mereka akan memilih untuk menuruti permintaan itu, meski memang harus terjebak ke dalam dunia profesi yang lebih menyerupai perbudakan

tersebut. Rata-rata, terdapat sekitar 64% hingga 75% penduduk desa di Jawa yang dipekerjakan dalam sistem tanam ini, dan angka itu belum termasuk jumlah tenaga kerja paksa lain yang difungsikan di dalam sektor-sektor non-perkebunan (Sediono, 1984: 58). Berdasarkan penelitian yang ada, disinyalir bahwa persentase jumlah keterlibatan penduduk pada tahun 1837, 1840, dan 1845 dalam sistem tanam paksa yang sebenarnya telah melebihi angka yang dituliskan oleh para pegawai kolonial di dalam laporannya (Kartodirjo dan Suryo, 1991). Dengan keterlibatan penuh waktu ini, maka para pekerja perkebunan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mengolah lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kondisi pertanian warga, yang menjadi terbengkalai karena para petaninya diharuskan bekerja di perkebunan-perkebunan milik pemerintah itu, membuat kebutuhan pangan menjadi sangat langka dan mahal. Selanjutnya, hal itu menimbulkan bencana kelaparan yang amat dahsyat di tengah masyarakat. Wilayah Karesidenan Cirebon, yang meliputi Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu, juga terkena dampak bencana kemanusiaan itu pada tahun 1844 (Breman, 1971). Angka kematian masyarakat pun semakin tinggi karena tubuh-tubuh tak berdaya milik para pekerja perkebunan yang kurang gizi itu menjadi tempat yang sangat mudah untuk dijangkiti penyakit.

Kelaparan yang merajalela di tengah masyarakat Kuningan pada masa itu, telah membuat sekelompok orang merasa kecewa dan semakin membenci pemerintah. Tidak mengherankan apabila kemudian sebagian besar penduduk yang sudah pasrah itu mencari tempat untuk mengadu dan berserah akan masalah yang tengah menimpanya. Tempat yang dituju masyarakat itu biasanya adalah kediaman-kediaman para kaum agamawan. Salah satu tempat orang shaleh yang banyak dijadikan sebagai tempat mengadu di Kuningan adalah tempat Kyai Hasan Maolani yang terletak di Lengkong. Sang ulama dianggap masyarakat sebagai ratu adil yang dapat mengeluarkan mereka dari derita tanam paksa. Tidak ingin mengambil resiko, pada awal tahun 1840-an para pegawai pemerintah kolonial pun membuang Kyai Hasan Maolani ke Kampung Jawa Tondano (Drewes, 1925).

Setelah pertengahan abad ke-19, masa keemasan perkebunan kopi pelan-pelan mulai meredup. Penyebabnya adalah mengemukanya berita mengenai penderitaan masyarakat ke tataran lingkungan yang lebih luas, dan menurunnya tingkat produktivitas

lahan perkebunan. Lahan perkebunan kopi yang letaknya jauh dari pemukiman warga dan berada di dataran tinggi yang berbukit-bukit, membuat tempat budidaya itu seakan-akan rimba kopi yang sulit dijamah dan tidak terawat (Van Gorkom, 1866). Selain itu, lahan yang terus dipergunakan tanpa henti ternyata membuat produktivitasnya semakin menurun drastis dan bahkan habis sama sekali. Penurunan itu dapat dilihat dari jumlah pohon kopi di tanah Priangan yang pada tahun 1866 hanya berjumlah 39.660.814, padahal sebelumnya peningkatannya cukup pesat, dari 45.271.330 pohon pada tahun 1835 yang kemudian bertambah sangat banyak hingga jumlah pohon kopinya mencapai angka 69.911.622 pohon pada tahun 1855 (Breman, 2014). Kondisi perkebunan pemerintah yang sudah tidak dapat diharapkan itu pun terus memburuk dan tanda-tanda akan perubahan pun semakin jelas terlihat.

Keadaan yang jauh berbeda dialami oleh usaha-usaha yang dimodali oleh pihak swasta. Memasuki tahun 1860, perbandingan hasil produksi untuk seluruh komoditas ekspor antara perkebunan pemerintah dan perkebunan swasta mulai berimbang. Padahal, pemerintah kolonial masih melaksanakan praktik-praktik kerja wajib kepada para petani dalam pengelolaan perkebunan mereka. Terang saja, hal itu semakin memperkuat desakan yang dilancarkan kaum liberal di parlemen Belanda untuk segera mengakhiri Sistem Tanam Paksa. Terlebih lagi, sudah sejak tahun 1850-an, koalisi kekuatan penyangga *Cultuurstelsel* telah melemah dan pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadi satu-satunya kekuatan politik yang tetap mendukung pelaksanaan sistem ini.

Dalam perkembangannya, kaum liberal di parlemen terus mendapatkan angin segar terkait akhir dari sistem yang mereka anggap telah usang dan kolot tersebut sepanjang tahun 1860-an. Hingga kemudian pada tahun 1870, Sistem Tanam Paksa secara resmi dihentikan oleh pemerintah dan digantikan oleh sistem yang lebih modern dan liberalistik, melalui Undang-Undang Agraria (Furnivall, 1948). Sejak beberapa tahun sebelumnya, penanaman wajib di sejumlah daerah memang telah dihentikan, namun tetap saja tahun 1870 mesti dianggap sebagai jejak paling penting dan utama bagi berakhirnya masa eksploitasi yang mengerikan dalam sejarah Nusantara.

## **SIMPULAN**

### **Simpulan**

Dari pemaparan sejarah perjalanan masyarakat ini diketahui bahwa kondisi sosio-ekonomi masyarakat Kuningan pada masa Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) benar-benar sangat memprihatinkan. Pajak kepala yang berupa penyerahan wajib (*contingenteringen*) menjadi momok paling menyengsarakan masyarakat di masa itu. Terlebih, para kepala daerah yang telah tergoda oleh bonus besar tanam paksa (*cultuurprocenten*) senantiasa menuntut setiap penduduk untuk bekerja lebih dari apa yang bisa mereka upayakan. Perkebunan nila dan kopi yang sempat dibudidayakan di sekitar dataran tinggi Ciremai merupakan pendorong langsung penduduk Kuningan untuk terjerembab ke lembah tanam paksa kolonial Belanda. Di tengah penderitaan masyarakat itu, pemerintahan kolonial dan para pegawainya malah memiliki nasib yang jauh berbanding terbalik karena mereka dapat hidup bahagia dengan bergelimang harta yang berasal dari keuntungan penanaman pelbagai komoditas ekspor perkebunan.

Masa eksploitasi yang paling menyengsarakan masyarakat Kuningan dan juga Jawa ini baru dapat dihentikan secara resmi ketika semangat kepedulian terhadap rakyat kecil kaum liberal di parlemen Belanda berhasil melahirkan Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, yang kemudian banyak menarik arus modal dan investasi pihak-pihak swasta untuk datang ke wilayah Nusantara.

### **D. Saran**

Sebenarnya, penelitian dan penulisan ini belum bisa dibuat secara sempurna karena masih banyak data-data regional kedaerahan mengenai tanam paksa yang belum dapat dijangkau, baik itu dikarenakan adanya alasan teknis ataupun lainnya. Penelitian lanjutan, terutama yang memandang permasalahan perkebunan di lembah Ciremai secara micro, mesti dilakukan agar dapat menyempurnakan tulisan sederhana ini.

Sebenarnya, terdapat tema-tema mengenai kondisi sosio-ekonomi masyarakat Kuningan lainnya yang juga cukup menarik perhatian, seperti misalnya dalam bidang pertanian ada mengenai permasalahan tanah dan sawah, serta perkebunan tebu. Di samping itu, kegiatan-kegiatan non-pertanian masyarakat yang mengedepankan aspek lain selain masalah pertanian.

Semua aktivitas sosio-ekonomi yang mengiri perjalanan masyarakat Kuningan ini patut untuk didalami dan diteliti lebih lanjut agar kemudian tema besar sejarah ekonomi dan perkembangan masyarakat Kuningan yang lebih komprehensif serta menyeluruh dapat disusun dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Arsip

Arsip Nasional (Nationaal Archief), Den Haag. Koleksi Baud No. 461, Laporan tentang keadaan budidaya nilai dan pabrik-pabriknya di Kabupaten Priangan, 14 April – 29 Juni 1835. Laporan kepada Direktur Jenderal Tanaman B.j. Elias dari Inspektur Tanaman L. Vitalis.

### Buku

- Abdurrahman, Dudung, 1999, *Metode Penelitian Sejarah*, Logos Wacana Ilmu, Tangerang.
- Anrooij, Francien van, 2014, *De koloniale staat (Negara kolonial) 1854-1942: Panduan Archief van het Ministerie van Koloniën (Arsip Kementerian Urusan Tanah Jajahan) Kepulauan Nusantara*, Penerjemah: Nurhayu W. Santoso dan Susi Moeimam, Nationaal Archief, Den Haag.
- Bastin, J., 1957, *The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra, An Economic Interpretation*, Oxford Clarendon Press, London.
- Breman, Jan, 1971, *Djawa, Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis*, Bhratara, Jakarta.
- Breman, Jan, 1983, *Control of Land and Labour in Colonial Java: A Case Study of Agrarian Crisis and Reform in the Region of Cirebon during the First Decades of the 20th Century*, Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en volkenkunde (KITLV), Dordrecht.
- Breman, Jan, 2014, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Burger, D.H., 1962, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Negara Prandnjaparamita, Djakarta.

- De Haan, F., 1910, *Priangan: de Preanger-Regentschappen onder Het Nederlandsch Bestuur tot 1811, Vol. I*, Koff, Batavia.
- De Haan, F., 1912, *Priangan: de Preanger-Regentschappen onder Het Nederlandsch Bestuur tot 1811, Vol. III*, Koff, Batavia.
- Drewes, Gerardus Willebrordus Joannes, 1925, *Drie Javaans Goeroes: Hun Leven, Onderricht en Messiasprediking*, Drukkerij A. Vros, Leiden.
- Ekadjati, Edi Suhardi, 2003, *Sejarah Kuningan: Dari Masa Prasejarah hingga Terbentuknya Kabupaten*, Kiblat Buku Utama, Bandung.
- Fasseur, C., 1975, *Kultuurstelsel en Koloniale Baten: de Nederlandse Exploitatie van Java 1840-1860*, Universitaire Pers Leiden, Leiden.
- Frederick, William H. dan Soeroto, Soeri (eds.), 2005, *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Furnivall, J.S., 1944, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Furnivall, J.S., 1948, *Netherlands Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and the Netherlands-Indie*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Kartodirdjo, Sartono, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono dan Suryo, Djoko, 1991, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Kuningan, BPS, 2015, *Kabupaten Kuningan dalam Angka (Kuningan Regency in Figure)*, BPS Kabupaten Kuningan, Kuningan.
- Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Melatoa, M. Junus, 1995, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Muanas, Dasum, 1998, *Arsitektur Tradisional Daerah Jawa Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Mustapa, R.H. Hasan, 1985, *Adat Istiadat Orang Sunda*, Penerjemah: Maryati Sastrawijaya, Penerbit Alumni, Bandung.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Notosusanto, Nugroho, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Depdikbud, Jakarta.

Usman, Hasan, 1986, *Metode Penelitian Sejarah*, Penerj. Mu'in Umar dkk., Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG, Jakarta.

Yatim, Badri, 1997, *Historiografi Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.

Tjondronegoro, Sediono, 1984, *Social Organization and Planned Development in Rural Java: A Study of the Organizational Phenomenon in Kecamatan Cibadak*, Oxford University Press, Singapura.

### **Artikel Jurnal dan Kumpulan Tulisan**

Baardewijk, F. van, 1986, 'Rural response to intensifying colonial exploitation; peasant reactions to the introduction and intensification of the forced cultivation of coffee in central and east Java, 1830-1880', Paper for the 5th Dutch-Indonesian Historical Conference, Lage Vuursche.

Croockewit, A.E., 1866, 'Zes weken in de Preanger-Regentschappen', *De Gids*, 30, seri ketiga, 4, hal. 290-328.

Gorkom, K.W. van, 1866, 'Gedwongen arbeid en kultures', *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indie*, 12, No. Seri 7, hal. 391-414.

Hefni, Moh., 2009, 'Patront-Client Relationship pada Masyarakat Madura', *Karsa*, Vol. XV, No. 1 (April), hal. 15-24.

Niel, Robert van, 1972, 'Measurement of Change under the Cultivation System in Java 1837-1851', *Indonesia*, No. 14 (Oktober), Cornell Modern Indonesia Project, hal. 89-109.

Padmo, Soegijanto, 1998, 'Perkembangan Kesempatan Kerja Nonpertanian di Karesidenan Cirebon, 1830-1930', dalam Lindblad, J. Thomas (ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, Penerjemah: M. Arief Rohman dan Bambang Purwanto, Pustaka LP3ES, Jakarta.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Fernando, M. R., 1982, *Peasants and plantation economy; The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the First Decade of the Twentieth Century*, Monash University, Melbourne.